



**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PENUTUPAN MASA SIDANG I
TAHUN SIDANG 2010-2011**

SELASA, 26 OKTOBER 2010

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2010**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PENUTUPAN MASA SIDANG I
TAHUN SIDANG 2010-2011**

SELASA, 26 OKTOBER 2010

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam Sejahtera bagi kita sekalian,

Yang kami hormati, para Wakil Ketua,

Yang kami hormati, para Anggota Dewan,

Alhamdulillah, kita bersama-sama telah melalui Masa Sidang I Tahun 2010-2011 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan lancar. Sebagaimana kita ketahui, Masa Sidang ini dilaksanakan mulai tanggal 16 Agustus 2010 dan berlangsung sampai dengan hari ini, 26 Oktober 2010, meliputi 48 hari kerja atau 78 hari kalender. Setelah itu,

Dewan akan memasuki masa Reses Persidangan I dimulai tanggal 27 Oktober sampai dengan 21 November 2010.

Pada Masa Sidang ini, Dewan berkomitmen untuk melaksanakan tiga (3) fungsi utama Dewan, yaitu 50% terfokus pada pelaksanaan fungsi legislasi, dan 50% terfokus pada pelaksanaan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Selain melaksanakan tiga (3) fungsi ini, Masa Sidang I ini, Dewan telah menetapkan beberapa pejabat publik dan memberikan rekomendasi atas penetapan duta-duta besar negara sahabat untuk Republik Indonesia sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Melalui *fit and proper test*, telah disetujui penetapan Panglima TNI yang baru Laksamana Madya TNI Agus Suhartono, SE menggantikan Jenderal TNI Djoko Santoso yang telah memasuki masa purnabhakti. Pergantian pucuk pimpinan TNI ini, diharapkan akan membawa keberlanjutan reformasi di tubuh TNI dan menjadikan TNI lebih profesional didukung teknologi yang semakin maju untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persetujuan yang diberikan Dewan kepada panglima TNI yang baru, disertai harapan bahwa Panglima TNI akan memegang teguh UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI, mengembangkan doktrin TNI dengan memperkuat

keterpaduan trimatra darat, laut, udara dan memperkuat perspektif TNI terhadap hak asasi manusia, dan penguatan netralitas TNI dalam Pemilu dan Pemilukada.

Pelaksanaan *fit and proper test* juga dilakukan kepada calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Secara aklamasi Dewan telah memberikan persetujuan pemberhentian Jenderalpol Bambang Hendarso Danuri MM, yang memasuki masa pensiun dan menyetujui pengangkatan Komjendpol Drs. Timur Pradopo sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Persetujuan secara aklamasi disertai dengan catatan dari fraksi-fraksi.

Dewan mengharapkan, Kapolri yang baru mampu membawa segenap jajaran Polri, tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pemelihara Kamtibmas serta benar-benar menjadi pelayan, pengayom dan pelindung masyarakat.

Beberapa persetujuan lain yang dilakukan oleh DPR adalah; penetapan Hakim Agung terpilih, atasnama Sri Murwahyuni SH, MH (karir) dan Dr. Sofyan Sitompul SH, MH (non karier). Pada saat ini, DPR sedang dalam proses pemilihan calon Ketua KPK, serta penetapan tujuh (7) anggota Komisi Yudisial. Komisi VIII DPR juga telah menyelesaikan *fit and proper test* dan menetapkan

keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Sembilan (9) nama telah masuk dalam hasil pertimbangan untuk menjadi anggota KPAI periode 2010-2013 yang mewakili unsur pemerintah, unsur tokoh agama, unsur tokoh masyarakat, unsur organisasi sosial, unsur organisasi kemasyarakatan, unsur organisasi profesi, unsur lembaga swadaya masyarakat, unsur dunia usaha, dan unsur kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.

DPR juga telah memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada calon duta-duta besar negara sahabat kepada Republik Indonesia dari negara: Republik Tunisia, Republik Afganistan, Republik Zambia, Republik Kazakstan, Kerajaan Spanyol, Republik Irlandia, Republik Kepulauan Fiji, dan Papua New Guinea.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Dalam bidang legislasi, kita sama-sama telah mengetahui bahwa pada tahun 2010, 70 (tujuh puluh) RUU telah ditetapkan menjadi prioritas pembahasan, dimana 36 (tiga puluh enam) RUU merupakan inisiatif DPR RI, dan 34 (tiga puluh empat) RUU merupakan usulan dari Pemerintah. Pada Masa Sidang I Tahun 2010-2011, Dewan telah berhasil

menyelesaikan tujuh (7) RUU yang disetujui menjadi UU, yaitu RUU Pertanggungjawaban Atas pelaksanaan APBN Tahun 2009, RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, RUU tentang Benda Cagar Budaya, RUU tentang Gerakan Pramuka, RUU tentang Protokol, RUU tentang Hortikultura, dan RUU tentang APBN Tahun 2011.

Sembilan (9) RUU usul DPR juga telah memasuki Pembicaraan Tingkat I, bahkan dua (2) diantaranya sudah masuk Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi dan segera memasuki pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan di awal masa persidangan II yaitu RUU tentang Mata Uang dan RUU tentang Perumahan dan Pemukiman. Satu (1) RUU dari Pemerintah juga telah masuk Tim Perumus yang akan segera memasuki Pembicaraan Tingkat II, yaitu RUU tentang Transfer Dana. Ada enam (6) RUU dari Pemerintah yang telah memasuki Pembicaraan Tingkat I, insya allah, pada masa persidangan II dapat diselesaikan.

Pimpinan menaruh perhatian terhadap penyelesaian RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. RUU yang telah disahkan ini, merupakan penyempurnaan dari UU No. 25 tahun 2003, dilatarbelakangi oleh keinginan untuk lebih memberdayakan rezim anti

pencucian uang di Indonesia, melalui penguatan empat pilar utama yaitu: **pertama**, hukum dan peraturan perundang-undangan. **Kedua**, sistem teknologi informasi dan sumber daya manusia. **Ketiga**, analisis dan kepatuhan. **Keempat**, kerjasama domestik dan internasional.

Pemberlakuan UU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum, dan standar internasional.

Penetapan pembahasan berbagai RUU dilakukan dengan sejauh mungkin mengakomodir berbagai masukan dari masyarakat, pemangku kepentingan, dan para pakar. Dalam hal pelaksanaan fungsi legislasi, kita berkomitmen untuk berusaha agar RUU prioritas dapat diselesaikan tepat waktu, berkualitas, berlaku untuk jangka panjang, memenuhi aspirasi masyarakat, sesuai dengan peruntukannya secara tepat, seimbang, dan adil. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi ini, diperlukan dukungan kuat dari unit pendukung fungsi legislasi dan berbagai langkah yang merupakan terobosan-terobosan baru, yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Dewan dan Fraksi-fraksi. Namun, perlu

difahami bahwa fungsi legislasi ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Dewan, tetapi juga menjadi tanggungjawab bersama dengan Pemerintah. Kesinergian kerja antara Dewan dan Pemerintah dalam mengimplementasikan fungsi legislasi akan menjadi faktor yang penting dalam peningkatan kualitas dan kuantitas RUU yang dihasilkan.

Berbagai RUU dari Pemerintah diharapkan segera disampaikan kepada DPR, antara lain; RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Jogjakarta, RUU tentang Desa, RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, RUU tentang Administrasi Pemerintahan, dan lain-lain.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Dalam menjalankan fungsi anggaran, Badan Anggaran DPR-RI telah bekerja secara prosedural dan proporsional dalam proses pembahasan RAPBN dan penetapan APBN. Sebagaimana kita ketahui, pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI sekarang ini tidak hanya sebatas pembahasan dan penetapan APBN, tetapi juga memiliki korelasi dalam hal keuangan negara. Oleh karena itulah Pimpinan DPR RI menyadari bahwa untuk meningkatkan peran DPR-RI dalam rangka memberikan bobot kelembagaan agar dapat bermitra setara dengan Pemerintah, diperlukan suatu badan yang

permanen, yaitu *budget house* yang didukung oleh sumberdaya manusia yang unggul serta ditunjang oleh *database* yang lengkap. Kita harapkan bahwa gagasan ini akan dapat direalisasikan dengan sebaik-baiknya demi kemajuan pelaksanaan fungsi anggaran DPR-RI.

Dalam kaitan dengan pembahasan RUU APBN 2011, pada Masa Sidang ini DPR-RI, Pemerintah dan Bank Indonesia, telah melakukan pembahasan secara maraton untuk menetapkan asumsi makro 2011. DPR bersama Pemerintah bersepakat menetapkan tingkat pertumbuhan ekonomi pada level 6,4% atau lebih tinggi 0,1% dari prediksi awal 6,3% pada RAPBN 2011. Asumsi tersebut diputuskan dengan tetap mewaspadaikan kondisi global, dan keseimbangan perekonomian Indonesia ke depan.

Dewan mengharapkan, dengan adanya kenaikan target pertumbuhan ekonomi tersebut akan mendorong kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB). Konsekwensi kenaikan pertumbuhan ekonomi tersebut, sejumlah target perekonomian dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) akan mengalami penyesuaian, tentunya dalam hal ini pemerintah harus bekerja lebih keras untuk mencapai target ini. Salah satunya dengan memaksimalkan penerimaan negara dengan solusi reformasi pada Dirjen Perpajakan, diantaranya adalah

menerapkan program ekstensifikasi dalam Ditjen Pajak dengan sumberdaya manusia yang memenuhi syarat dan praktek yang sehat, bertujuan meningkatkan penerimaan negara di sektor pajak.

Dengan diselesaikannya RUU APBN 2011, Dewan mengharapkan agar pelaksanaan anggaran dapat mencapai target-target yang telah ditetapkan berdasarkan prioritas-prioritas dan asumsi-asumsi makro yang telah ditetapkan. Untuk itu, Dewan mengingatkan kepada Pemerintah agar mendorong proses pembangunan dan program-program Pemerintah yang ada, persoalan **daya serap anggaran** yang rendah, tidak seharusnya terjadi lagi pada anggaran 2011. Tentunya, dengan tetap mengutamakan target kinerja terhadap program-program yang telah ditetapkan. Dalam kerangka itu, Dewan mendorong Pemerintah untuk terus melakukan pembenahan-pembenahan terhadap persoalan-persoalan internal kementerian dan lembaga, penyempurnaan mekanisme pengadaan barang dan jasa, pembenahan terhadap persoalan pelaksanaan anggaran dan mekanisme revisi dan lain-lain.

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Berkaitan dengan pelaksanaan APBN, Komisi VII mendesak Pemerintah menetapkan kuota yang realistis untuk BBM bersubsidi tahun 2011. Dalam kesepakatan pembahasan RAPBN 2011, volume konsumsi BBM bersubsidi ditetapkan sebesar 38,59 juta KL (kiloliter). Dengan adanya kesepakatan volume konsumsi BBM bersubsidi tersebut, maka Pemerintah bisa segera memutuskan **skenario** pembatasan penggunaannya, dan berharap mekanisme yang akan diterapkan Pemerintah dapat diterima semua pihak.

Dalam kaitan ini, Komisi VII DPR, memberikan beberapa catatan, perlunya Pemerintah menyiapkan redesign kebijakan subsidi dan penghematan penggunaan BBM bersubsidi. PT Pertamina juga diminta untuk meningkatkan efisiensi dan pengendalian didalam pendistribusian BBM bersubsidi dengan memperhatikan hasil-hasil temuan BPK-RI. BPH Migas diminta melakukan pengawasan yang lebih ketat, agar pendistribusian BBM bersubsidi tepat sasaran.

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Demikian juga halnya dengan masalah tarif listrik, Dewan menolak rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL) tahun 2011 mendatang. Pemerintah berencana menaikkan TDL sebesar 5,4 persen, guna menutupi kekurangan anggaran PLN sebesar Rp. 4,6 triliun. Dewan berpendapat bahwa kenaikan itu **tidak perlu terjadi**, karena masih banyak cara yang bisa dilakukan untuk menutupi kekurangan subsidi tersebut. Diantaranya, dengan melakukan penghematan serta efisiensi di tubuh PLN. Dewan mencatat, PLN sendiri yang akan melakukan penghematan dari tahun 2010 hingga tahun 2015 dengan dilakukannya efisiensi, baik di sektor pembangkit, pengadaan maupun belanja rutin.

Dewan mengingatkan bahwa biaya sosial sebagai dampak dari kenaikan itu cukup tinggi, meskipun kenaikan hanya 5,4% tapi opini dari masyarakat akan negatif. Rakyat berhak menikmati subsidi dari Pemerintah, termasuk penerangan dari PLN. Walaupun kenaikan tersebut kecil, namun hak rakyat untuk memperoleh energi listrik harus terpenuhi.

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Komisi VI DPR-RI menyetujui rencana Kementerian BUMN berkaitan *rights issue* PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan Bank Mandiri (Persero) Tbk, dengan penerbitan saham tambahan untuk ditawarkan kepada publik. Namun demikian, Dewan mendesak Pemerintah tetap mempertahankan kepemilikan pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT. BNI (Persero) Tbk minimal sebesar 60%, diluar atau termasuk opsi kepemilikan saham oleh manajemen/karyawan (MSOP) sesuai dengan keputusan Pemerintah.

Selain itu tentunya pemerintah harus mematuhi prosedur dalam proses privatisasi kedua bank BUMN itu, mengikuti tata cara privatisasi yang diatur dalam UU No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan PP. No. 33 tahun 2005 jo PP. No. 59 tahun 2009.

Dewan mengharapkan Pemerintah untuk mengelola deviden yang ditarik Pemerintah secara proposional dengan memperhitungkan ketersediaan modal kerja dan investasi yang dibutuhkan. Untuk menjamin kecukupan modal PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT. BNI (Persero) Tbk, serta untuk menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi

pembiayaan ekonomi nasional. Dewan mengharapkan Pemerintah dapat mengoptimalkan deviden PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT. BNI (Persero) Tbk, dan dapat meningkatkan kinerjanya.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPR-RI telah memfokuskan pada hal-hal berkaitan dengan isu-isu strategis yang mengemuka. DPR-RI juga telah membentuk tim-tim pengawas untuk kasus-kasus tertentu. Secara khusus, Dewan juga konsisten menindaklanjuti rekomendasi hasil Rapat Paripurna tentang Pengusutan Kasus Bank Century. Tim Pengawas DPR-RI telah bekerja secara transparan dan intensif dengan berbagai pihak sesuai dengan koridor hukum yang ada, serta mengupayakan agar aset-aset Century yang diambil secara tidak sah dapat segera dikembalikan kepada negara.

Dalam hal pengawasan atas kebijakan anggaran, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR-RI telah menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK-RI sebagai dasar untuk mengesahkan RUU Pertanggungjawaban APBN. Kita patut bersyukur bahwa BAKN sebagai badan di DPR RI yang relatif masih baru, telah memfungsikan dirinya dengan baik

dan tentunya akan terus kita sempurnakan kinerja dan fungsinya dari waktu ke waktu.

Dalam hal pengawasan, Komisi II DPR-RI telah melakukan bahasan dengan pemerintah dan pihak-pihak terkait, berkaitan dengan penyelamatan terhadap aset-aset negara. DPR-RI mengajak semua pihak, terutama Pemerintah, untuk secara serius melakukan upaya-upaya penyelamatan aset negara dengan tetap pada koridor hukum yang berlaku. Penyelamatan aset-aset negara, terutama diperuntukkan bagi kepentingan bersama rakyat Indonesia dan negara. Jangan sampai prinsip dasar ini melenceng menjadi pemanfaatan aset-aset negara untuk kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompok-kelompok tertentu.

Dewan terus melakukan koordinasi secara intensif dengan Sekretariat Negara dalam mengawal kebijakan Pemerintah yang dikeluarkan untuk penyelamatan aset negara. Dewan juga kembali menyatakan dorongannya kepada BPK-RI, untuk secara lebih serius melakukan audit investigatif atas kasus-kasus penyerobotan hak milik negara.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Menyikapi terjadinya kasus penarikan produk mie instan PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk oleh Pemerintah

Taiwan baru-baru ini, Komisi IX telah memanggil Badan POM RI dan pihak-pihak terkait. Komisi IX mengingatkan kembali kepada Pemerintah bahwa memberikan jaminan keamanan makanan dan minuman yang beredar adalah kewajiban pemerintah sesuai amanat UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Untuk itu, Badan POM RI diminta memperketat pengawasan post market produk-produk makanan dan minuman yang menjadi konsumsi massal di masyarakat, dan melakukan uji sampel secara periodik dan berkesinambungan, sehingga masyarakat terlindungi dan aman.

Dalam kaitan dengan tugas-tugas Komisi, Pimpinan Dewan menggarisbawahi kinerja Komisi V yang mengundang Menteri Perhubungan, Direksi PT Kereta Api dan Ketua KNKT, sehubungan dengan peristiwa kecelakaan Kereta Api Argobromo dan Senja Utama di Stasiun Petarukan dan kereta api Bima dengan Gaya Baru malam di stasiun Purwosari. Kita ketahui bahwa kecelakaan tersebut merupakan kecelakaan terbesar setelah 20 tahun terakhir setelah terjadinya kecelakaan Kereta Api di Bintaro di tahun 1987.

Dalam kurun waktu 1 Januari hingga 31 Juli 2010 saja, terjadi 32 kasus kecelakaan kereta api dengan rincian 7 kasus berupa kecelakaan Kereta Api yang bertabrakan dengan kendaraan umum, 17 kasus akibat anjloknya gerbong, 3

kejadian akibat tergulingnya gerbong, 3 kejadian akibat banjir dan longsor dan dua kejadian karena faktor lain-lain.

Berkaitan dengan banyaknya kecelakaan Kereta Api, Komisi V DPR-RI telah membentuk Panitia Kerja Perkerataapian untuk merespon dan melakukan pendalaman terhadap musibah kecelakaan kereta api yang terjadi pada awal Oktober di Pemalang dan Solo.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Beberapa kerusuhan yang terjadi akhir-akhir ini, seperti kerusuhan bernuansa etnis di Tarakan, Kalimantan Timur, pertikaian antar-kelompok di Jalan Ampera, Jakarta, dan anarkisme atau sabotase berupa pembakaran terhadap 24 gerbong Kereta Api di stasiun Rangkas Bitung, Banten dan konflik antar-pengikut agama di Bekasi telah menimbulkan keprihatinan yang sangat mendalam. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa keharmonisan kehidupan dalam masyarakat masih labil dan masih banyak potensi gesekan antaretnis, antarkelompok, dan antarumat beragama. Ada kecenderungan masyarakat tidak peduli dengan hukum atau tidak takut kepada aparat penegak hukum. Hukum seolah-olah sudah tidak ada lagi atau sudah tidak berdaya lagi.

Komisi II DPR RI telah mengadakan rapat gabungan dengan Komisi III, Komisi VIII dan Pemerintah untuk membahas tentang masalah organisasi kemasyarakatan. Dari hasil bahasan disimpulkan bahwa DPR dan Pemerintah menolak seluruh bentuk tindakan kekerasan atas nama apapun (suku, agama, kelompok etnis, kelompok kepentingan, dan lain-lain) karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mendorong Pemerintah dan aparat penegak hukum agar bertidak tegas dalam menegakkan hukum terhadap perilaku-perilaku kekerasan dan anarkhis yang meresahkan masyarakat, bahkan dapat mengancam persatuan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk itu diperlukan **upaya penanganan yang terukur dan terkoordinasi** antar-institusi negara (terutama institusi bidang keamanan di bawah Presiden) tanpa mengabaikan penghargaan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi. Pelibatan tokoh-tokoh/elemen masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada warganya, agar para warga masyarakat dapat menahan diri apabila terjadi suatu permasalahan.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Perubahan cuaca dan iklim yang bersifat ekstrem akhir-akhir ini memang merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya berbagai bencana alam. Namun demikian, hal ini juga tidak terlepas dari faktor kerusakan dan perubahan fungsi lingkungan hidup yang telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah untuk menata ulang dan melakukan perbaikan terhadap kerusakan lingkungan hidup, agar bencana serupa tidak terjadi di kemudian hari. Anomali cuaca juga berpotensi mengganggu aktivitas pertanian, termasuk perikanan. Kegagalan panen dan sedikitnya hasil tangkapan ikan yang diperoleh nelayan dapat mengancam ketersediaan pangan. Oleh karena itu perlu dipikirkan langkah-langkah seluruh pemangku kepentingan terkait untuk mengamankan ketersediaan pangan di dalam negeri.

Bencana alam terjadi di beberapa wilayah tanah air, antara lain bencana banjir bandang di Wasior, Papua Barat, banjir di Kab. Aceh Utara Prov. NAD, dan Kab. Luwu Utara, Prov. Sulawesi Selatan, serta tanah longsor di Kab. Morowali, Prov. Sulawesi Tengah. Penanganan pasca-musibah oleh pihak-pihak terkait perlu dilaksanakan secara cepat, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar para

korban yang sampai saat ini masih tinggal di pengungsian seperti bantuan pangan, air bersih, dan obat-obatan.

Dalam kaitan bencana banjir bandang di Wasior, Dewan menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya lebih dari 150 orang dan 145 yang dinyatakan hilang. Bencana ini sangat memprihatinkan. Dewan menaruh perhatian atas kedatangan Presiden dan pejabat terkait di wilayah bencana dan bertatap muka dengan para korban. Langkah ini sangat diperlukan untuk menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap saudara kita yang berada di wilayah Indonesia bagian timur sekaligus mendukung keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dewan mendukung Pemerintah untuk membangun kembali wilayah ini.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Masih ada beberapa masalah yang mengganjal dalam hubungan bertetangga kita dengan Malaysia, salah satunya adalah dalam masalah perbatasan. Seringkali terjadi pelanggaran terhadap kawasan perbatasan Indonesia oleh Malaysia. Dewan mendesak Pemerintah mengambil langkah-langkah yang diperlukan dengan mengutamakan kepentingan

nasional NKRI untuk mencegah terulangnya insiden yang terjadi di daerah perbatasan.

Dewan berpendapat bahwa perundingan penetapan batas wilayah antara Indonesia dengan negara-negara tetangga merupakan prioritas nasional dan mendesak Pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar kejadian ini tidak berulang kembali.

Masalah sengketa perbatasan ini juga menjadi salah satu hal yang mengemuka, yang diangkat oleh delegasi DPR-RI dalam sidang ASEAN Interparliamentary Assembly (AIPA) yang berlangsung di Hanoi Vietnam akhir September lalu. Indonesia, memang berkepentingan dalam masalah perbatasan, khususnya sengketa perbatasan antarnegara ASEAN. Dalam kesempatan sidang inipun, Indonesia mendorong agar penanganan kejahatan lintasnegara, seperti pencucian uang, *cybercrimes*, penyalahgunaan obat terlarang, dan *human trafficking* agar ditindaklanjuti penyelesaiannya melalui kerangka regional maupun melalui ASEAN *Extradition Treaty* yang diharapkan segera terbentuk.

Selanjutnya dalam rangka menjaga harkat dan martabat bangsa serta negara Indonesia, Dewan dapat memahami penundaan kunjungan kenegaraan Presiden Indonesia ke Kerajaan Belanda. Dewan mendesak pemerintah

untuk meningkatkan fungsi peringatan dini dan antisipasi, terkait dengan upaya pengamanan kunjungan kenegaraan Presiden Indonesia ke luar negeri maupun kunjungan kepala negara sahabat ke Indonesia.

Dewan juga mendesak pemerintah untuk melanjutkan dan meningkatkan diplomasi dan kerjasama antar negara serta komunikasi dengan kelompok-kelompok masyarakat dalam rangka mendukung NKRI. Selanjutnya, Dewan mendukung pemerintah untuk melakukan langkah diplomasi kepada pemerintah Kerajaan Belanda agar tidak memberikan ruang kepada gerakan separatisme terhadap NKRI sesuai dengan dasar-dasar yang berlaku dalam hubungan internasional.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Sidang ASIAN Parliamentary Assembly yang berlangsung baru-baru ini di Jakarta, dihadiri oleh 22 parlemen dari negara-negara anggota, telah membahas berbagai isu antara lain masalah penanganan kemiskinan, terorisme dan resolusi mengenai masalah palestina, dan ancaman penggunaan tenaga nuklir dan sebelas (11) resolusi lainnya. DPR-RI yang menjabat presiden APA untuk kurun waktu dua (2) tahun, akan membawa berbagai hasil Sidang

Executive Council untuk dibahas lebih lanjut dan mendapat persetujuan pada Sidang APA bulan depan di Suriah.

Dengan berbagai bahasan dalam draf resolusi yang antara lain diusulkan dalam berbagai sub-komite yang dibentuk, kiranya menjadikan peran diplomasi parlemen Indonesia, menjadi lebih bermakna dan mewarnai sidang-sidang yang sudah dan akan berlangsung.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Terselamatkannya tiga puluh tiga (33) penambang yang terjebak di liang pertambangan sedalam 700 m selama 69 hari di Chile baru baru ini, telah mengundang empati dan perhatian masyarakat dunia. Sejak awal, Presiden Chile Sebastian Pinera, bertekad untuk menyelamatkan para petambang yang terjebak. Berbagai kebijakan dan langkah-langkah kontroversial ditempun dalam rangka penyelamatan ini, baik berkaitan dengan masalah teknis, akses teknologi, penggalangan dana, dan berbagai hal bagi keselamatan petambang. Semua langkah tersebut akhirnya membuahkan hasil, tiga puluh tiga (33) orang petambang selamat. Masyarakat dunia, khususnya masyarakat Chile menyambut dengan lega. Ini adalah bobot kepemimpinan Presiden Chile

yang mendapat dukungan politis dari masyarakat internasional termasuk masyarakat Indonesia.

Inilah sentuhan nilai-nilai kemanusiaan seorang pemimpin negara yang patut kita contoh dan diteladani, terutama oleh para pemimpin kita menghadapi berbagai bencana yang melanda akhir-akhir ini.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Dua hari yang akan datang, akan berlangsung Peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-82. Kalangan Dewan berharap agar peringatan ini menjadi momentum bagi kita semua, seluruh bangsa untuk dapat meneladani para tokoh pemuda saat itu, yang telah berhasil meletakkan landasan penting bagi kelanjutan perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Penghargaan terhadap para pendiri bangsa dan pencetus Sumpah Pemuda, tidak cukup dengan memperingati Hari Sumpah Pemuda setiap tahun, namun yang lebih penting adalah menerapkan secara konsisten ikrar pemuda kedalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam kehidupan berbangsa maupun bermasyarakat. Tidak kalah penting adalah menjaga keberagaman, persatuan dan kesatuan bangsa, dan kerukunan antarumat beragama.

Sebelum saya mengakhiri Pidato Penutupan Masa Sidang I ini, ada baiknya Pimpinan Dewan merespon pendapat masyarakat/media massa berkaitan dengan kinerja alat-alat kelengkapan Dewan, khususnya kegiatan kunjungan kerja ke luar negeri.

Perlu diketahui bahwa, kunjungan kerja ke luar negeri telah memiliki dasar hukum yang diatur dalam peraturan Tata Tertib DPR Pasal 143 ayat (3) (4) dan (5). Alat-alat kelengkapan Dewan dapat melakukan kunjungan kerja ke luar negeri dengan dukungan anggaran DPR dan dengan persetujuan Pimpinan DPR. Persetujuan diberikan dengan mempertimbangkan rencana kerja yang diusulkan oleh alat-alat kelengkapan Dewan, mempertimbangkan urgensi, kemanfaatan dan keterkaitan negara tujuan dengan materi RUU yang sedang dibahas. Kunjungan ke luar negeri akan efektif, jika dilaksanakan sesuai perencanaan yang matang, pertemuan dengan lembaga/masyarakat yang tepat, pemilihan negara yang tepat, serta jadwal yang sarat dengan program untuk mencari masukan terkait materi RUU yang sedang dibahas.

Adapun kunjungan kerja Badan Kehormatan (BK) ke luar negeri adalah berkaitan dengan adanya penugasan kepada BK untuk melakukan evaluasi dan penyempurnaan

peraturan Tata Tertib dan Kode etik sebagaimana diatur Tata Tertib Pasal 312.

Kedepan, Pimpinan dewan mengharapkan bahwa mekanisme kunjungan kerja ke luar negeri ini perlu ditata kembali, disempurnakan, baik dari segi efisiensi ataupun besarnya dukungan anggaran. Penyempurnaan ini, tidak saja diperlukan bagi alat kelengkapan Dewan, tetapi juga pedoman kepada Pimpinan Dewan yang akan memberikan persetujuan atau menolak atas rencana kunjungan luar negeri tersebut.

Masih dalam kaitan pelaksanaan Kode Etik, Pimpinan Dewan mengingatkan kembali perlunya ditegakkan etika anggota Dewan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Manakala suatu permasalahan sudah diselesaikan oleh salah satu alat kelengkapan Dewan, kemudian diperkuat oleh keputusan fraksi-fraksi dalam Rapat Konsultasi Pimpinan Dewan dan fraks-fraksi, Pimpinan berharap semuanya memberikan apresiasi atas keputusan tersebut, demi citra lembaga yang sangat kita cintai ini.

Demikianlah yang dapat kami sampaikan dalam Sidang Paripurna Dewan ini. Tentunya kita semua berharap agar kinerja Dewan pada masa sidang selanjutnya akan lebih

disemangati dengan niat yang tulus untuk melaksanakan semua fungsi dewan dengan sebaik-baiknya.

Selanjutnya, izinkanlah kami menutup Sidang Paripurna Dewan ini. *Insy Allah* kita akan bertemu kembali pada tanggal 22 November 2010 untuk mengawali Masa Persidangan II Tahun Sidang 2010-2011. Kita tutup sidang ini dengan mengucapkan syukur, *Alhamdulillahirrabbi'alamin*.

***Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamith Thariq,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahiwabarakatuh.***

KETOK 3 X

Jakarta, 26 Oktober 2010

**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Dr. H. Marzuki Alie